

EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program studi Manajemen (S1)



OLEH :

Achmad Haditheo Zailany

NPM. 18610004P

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang (UU) Nomor 17 mengenai Keuangan Negara mengamanatkan bahwa “bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan tersaji sinkron menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan SAP Berbasis Kas menuju Akruai ini dilaksanakan sinkron menggunakan jangka waktu”. Selanjutnya setiap entitas pelaporan, baik dalam pemerintah pusat juga pemerintah daerah harus melaksanakan SAP Berbasis Akruai, Walaupun entitas pelaporan interim masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akruai, entitas pelaporan dibutuhkan bisa segera menerapkan SAP Berbasis Akruai. Perubahan basis akuntansi ini nir dan merta muncul lantaran sebenarnya telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 dijelaskan bahwa: “pemasukan negarah adalah hak pemerintah pusat/daerah menggunakan diakui menjadi penambah nilai kekayaan bersih”.

Sedangkan belanja pusat/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah menggunakan diakui menjadi pengurang nilai kekayaan bersih. Penerapan akuntansi berbasis akruai pada pemerintah diatur dalam pasal 7 PP No. 71 Tahun 2010 menggunakan menjelaskan bahwa:

“Penerapan SAP Berbasis Akruai bisa dilaksanakan secara sedikit demi sedikit menurut penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruai sebagai penerapan SAP Berbasis Akruai. Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan SAP Berbasis Akruai secara sedikit demi sedikit dalam pemerintah sentra diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan”.

Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan SAP Berbasis Akruai pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akruai secara penuh paling lambat tahun aturan 2015. Pada dasarnya seluruh pernyataan baku akuntansi pemerintah adalah baku buat menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, dimana

komponen-komponen tadi dijelaskan dalam Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 menjadi berikut: “Laporan Realisasi Anggaran (IRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (IPSAI), Neraca, Laporan Arus Kas (IAK), Laporan Operasional (IO), Laporan Perubahan Ekuitas (IPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”. Komponen Laporan keuangan tadi, selanjutnya disusun menggunakan memakai kodifikasi akun 1 hingga menggunakan 9 sinkron Badan Akun Standar (BAS). PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan keuangan tujuannya yaitu buat mengatur penyajian Laporan keuangan buat tujuan umum (general purpose financial statement) dalam rangka menaikkan keterbandingan Laporan keuangan baik terhadap aturan antar periode, juga antar entitas.

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan keuangan menggunakan memakai basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, juga pengakuan aset, kewajiban, dan entitas. Dari penjelasan diatas penulis mengangkat penelitian pada tempat kerja badan pemerintah keuangan aset wilayah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur , buat mengetahui bagaimanakah “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual”.

Menggunakan diterapkan atas Laporan keuangan wilayah itu sanggup mamenuhi SAP menggunakan telah ditentukan. Sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual pemerintah sanggup mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, supaya bisa lebih terukur kinerjanya. Hal tadi dibutuhkan bisa mendorong efisiensi atas aktivitas-aktivitas menggunakan dilakukan dan mendorong terwujudnya (*good and clean corporate governance*) sebagai akibatnya tujuan pembangunan buat kemakmuran seluruh warga bisa dicapai, Sehingga buat mencapai tujuan tadi pemerintah dan seluruh pemerintah wilayah wajib bisa mempertahankan kualitas Laporan keuangannya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih kurang dan belum terukur kinerjanya
- b. Laporan keuangan belum disusun sesuai SAP Berbasis Akrual

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Penyajian laporan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Penyajian Iaporan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Iampung Timur

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dengan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Peneliti

Hasil observasi ini di jadikan sebagai acuan atau pedoman bagi penulis dalam menyusun Iaporan keuangan dengan sesuai dengan kaidah-kaidah dengan di tetapkan oleh sistem keuangan maupun akuntansi secara benar dan terstruktur.

b. Bagi Akademis

Hasil Penelitian di harapkan menjadi pedoman atau studi perbandingan serta pertimbangan dalam analisis Iaporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai sarana untuk menambah wawasan mahasiswa pada matakuliah akuntansi khususnya pada Iaporan keuangan dan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi penulis membagi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini Penulis akan menguraikan Iatar Belakang Penelitian, Identifikasi masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam Bab II berisi kajian literatur dengan diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep dengan relevan untuk membahas permasalahan dengan telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab III ini, membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja dengan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dengan digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi perusahaan, analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya dengan disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria dengan ada dan pembuktian kebenaran serta jawaban dari pertanyaan dengan telah disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan hasil riset dan kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

